

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kepentingan Nasional Indonesia adalah mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan pengakuan Internasional atas kemerdekaan Indonesia sebagai Negara berdaulat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan perjuangan diplomasi seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem Royen dan KMB (Konferensi Meja Bundar). Keikutsertaan Indonesia dalam GNB (Gerakan Non Blok) disebabkan oleh kesesuaian prinsip GNB dengan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif. Indonesia memiliki keyakinan bahwa perdamaian hanya tercipta apabila tidak mendukung pakta militer atau aliansi militer, dalam hal ini GNB di anggap paling tepat. Indonesia berperan sebagai pelopor berdirinya GNB.

Pada tahun 1945 dunia Internasional berada pada dua kekuatan besar yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Kedua Blok itu berlomba-lomba menyusun dan mengembangkan kemampuannya disemua bidang politik, ekonomi, militer dan budaya maupun propaganda. Kedua kekuatan ini membagi dunia dalam dua Blok yang bersaing satu sama lain dalam menanamkan pengaruh masing-masing terhadap Negara lain didunia. Perang Dunia II berakhir, Uni Soviet segera melebarkan sayap ke Eropa Timur (M. Sabir 1987:12). Dimana pada masa ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia khususnya terhadap pemerintahan Soekarno.

Hadirnya Negara Adikuasa di dunia seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet mengarahkan pada jalannya revolusi yang merupakan dampak dari ketegangan dan persaingan yang terjadi pada Kedua Negara, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet yang terjadi setelah Perang Dunia II yang dikenal dengan Perang Dingin. Perang Dingin muncul setelah Perang Dunia II, dalam hubungan Internasional terjadi perebutan kekuasaan secara besar-besaran melalui konflik Ideologi dan politik antara Kedua Blok yang berlawanan yaitu Blok Barat dengan menganut Ideologi Kapital-Liberal yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur dengan menganut Ideologi Komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet.

Morgenthau (1993:3) mengatakan :“Cara ini bukanlah gejala baru, karena dimasa lalu Negara-Negara telah berusaha membendung *power* lawan dengan menerapkan berbagai cara dan sarana selain perang”.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diambil pengertian bahwa dalam Perang Dingin ini cara dan sarana apapun dilakukan untuk saling menambah kekuatan masing-masing Negara Adikuasa. Lahirnya perseteruan antara dua Negara pemenang Perang Dunia II tidak lepas dari perbedaan Ideologi Kedua Negara tersebut. Amerika Serikat ber Ideologi Kapital-Liberal dan Uni Soviet ber Ideologi Komunis. Hal ini adalah pemicu lahirnya Perang Dingin dan berdampak pada politik Indonesia. Soekarno dan Hatta hadir sebagai Dwi Tunggal perjuangan bangsa kita yang memberikan pengaruh sangat besar pada perkembangan Indonesia untuk menentukan kebijakan terkait dengan Politik Luar Negeri Indonesia sehingga revolusi berjalan mengarah yang lebih baik.

Peter Kasenda (2014:177) mengatakan :

Pada Politik Luar Negeri masa revolusi nasional terdapat dua hal metode yang digunakan Indonesia dalam menyelesaikan konflik, dimana kedua metode ini memiliki perbedaan yang mendasar akan tetapi saling mendukung satu sama lain dalam hal penyelesaian konflik yakni metode kekuatan bersenjata dan diplomasi.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diambil pengertian bahwa terdapat dua metode untuk menyelesaikan konflik, dan dua metode tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Metode tersebut adalah metode kekuatan bersenjata dan metode diplomasi, walaupun memiliki perbedaan yang sangat mendasar namun kedua metode tersebut saling mendukung antara satu dengan yang lain dalam hal penyelesaian konflik.

Politik Luar Negeri yang diterapkan Indonesia tidak terlepas dari pengaruh dinamikan politik Internasional pasca Perang Dunia II yang didominasi oleh Blok Barat yaitu Amerika Serikat dan Blok Timur yaitu Uni Soviet dalam konteks Perang Dingin. Banyak Negara-Negara di dunia yang tidak lepas dari arus konstelasi yang sedang terjadi tersebut, Negara-Negara tersebut berlomba menjadi aliansi Blok Barat dan Blok Timur, dalam posisi seperti ini membuat Indonesia mengalami masa-masa sulit sehingga terjadi konflik domestik antara golongan kanan yang pro dengan Blok Barat dan golongan kiri yang pro dengan

Blok Timur. Dalam situasi politik seperti itu akhirnya Bung Hatta mencoba merumuskan Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas Aktif.

Prinsip Politik Luar Negeri tersebut tertuang dalam beberapa hubungan Internasional yang dilakukan Indonesia yaitu, pembentukan Gerakan Non Blok (GNB) sebagai wujud ketidakberpihakan Indonesia pada Blok Barat ataupun Blok Timur (wujud makna bebas). Pencarian pengakuan kedaulatan pasca kemerdekaan dengan menggunakan jalur diplomasi melalui perundingan-perundingan (wujud makna aktif).

Urgensi dari penelitian ini bahwa belum adanya penelitian yang memaparkan secara rinci kebijakan Politik Luar Negeri pada masa pemerintahan Soekarno. Pada masa awal kemerdekaan untuk menjalankan Politik Luar Negeri masih memiliki banyak tantangan baik dari luar maupun dari dalam negeri. Pemerintah berusaha untuk menjalankan hubungan diplomatik dan mendapat kepercayaan dari Negara lain.

Berdasarkan hal-hal di atas penelitian ini ingin mencoba menjelaskan Politik Luar Negeri Indonesia masa pemerintahan Soekarno dari awal munculnya Perang Dingin yaitu tahun 1947 yang memicu lahirnya Politik Luar Negeri Bebas Aktif sampai akhir jabatan pemerintahan Soekarno yaitu tahun 1966. Selanjutnya mengapa dalam penelitian ini menjelaskan Politik Luar Negeri Indonesia dari tahun 1947, karena pada tahun tersebut awal mula perseteruan antara Amerika Serikat (Blok Barat) dengan Uni Soviet (Blok Timur) pasca Perang Dunia II yang memunculkan perang baru di dunia yang disebut Perang Dingin.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari Latar Belakang Masalah tersebut maka yang menjadi masalah bagi penulis adalah : **Perlu Di Deskripsikannya Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan Presiden Soekarno (1947-1966).**

Dari uraian masalah tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses lahirnya Politik Luar Negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno?
2. Bagaimana pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno bagi Indonesia dan Negara Luar?

Dari rumusan masalah yang telah disampaikan, maka dapat diangkat judul penelitian sebagai berikut: **Kajian Historis Tentang Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan Presiden Soekarno (1947-1966).**

C. Batasan Konsep dan Batasan Istilah

1. Batasan Konsep

Dalam melakukan sebuah penelitian sejarah ini, batasan konsep dipandang perlu dalam memudahkan melakukan sebuah penelitian sejarah. Dapat juga digunakan untuk mengenali konsep-konsep yang hendak dikaji dalam penelitian sejarah, targetnya agar dalam prosedur penelitian rancangan yang hendak di telaah tidak keluar dari koridor rancangan yang hendak dikaji. Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan konsep, yaitu sebagai berikut:

a. Konsep Politik Luar Negeri

Konsep Politik Luar Negeri tidak terlepas dari hubungan antara suatu Negara dengan Negara lain. Hubungan dan kerjasama antara satu Negara dengan Negara lain perlu dilakukan karena Negara yang berdaulat dan merdeka membutuhkan bantuan, dorongan, dukungan, dan kerjasama dengan Negara lain. Seperti halnya dengan Indonesia, Negara Indonesia menjalin kerjasama dengan berbagai Negara di dunia untuk membentuk aliansi maupun kerjasama dalam perdagangan. Hal ini tentunya harus terdapat kebijakan Politik Luar Negeri agar kedua belah pihak yang saling bekerjasama mendapatkan keuntungan masing-masing. Miriam Budiarto (1995:12) mengatakan :

Politik Luar Negeri sebagai Kebijakan (*Policy*) adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok dalam usaha memiliki tujuan, kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diambil pengertian bahwa Politik Luar Negeri memiliki arti suatu kebijakan yang diterapkan oleh suatu Negara dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini suatu kelompok ataupun Negara merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Politik Luar Negeri dalam konteks ini adalah suatu Negara yang menerapkan kebijakan yang mengatur hubungan Negara tersebut dengan Negara lain baik itu Negara

tetangga maupun Negara-Negara di dunia. Tujuan dari penerapan kebijakan Politik Luar Negeri terdiri dari berbagai tujuan diantaranya adalah membangun kerjasama dalam aspek kehidupan berbangsa dan berNegara, menjalin hubungan diplomasi, politik, maupun ketata Negaraan, dan mendapatkan dukungan dari Negara lain. Mappa Nasrun (1990:98) mengatakan :

Kebijakan Luar Negeri suatu Negara pada hakekatnya merupakan refleksi dari keadaan dan perkembangan dalam negerinya, juga keadaan dan perkembangan sistem politik internasional dapat menjadi faktor yang turut menentukan perilaku kebijaksanaan luar negeri. Jadi kebijaksanaan luar negeri pada pokoknya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal.

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa kebijakan politik luar negeri lahir dari suatu keadaan yang terjadi baik didalam maupun di luar suatu Negara itu, termasuk dalam keadaan dan perkembangan Negara serta kondisi politik dari seluruh Negara. Dalam hal ini dapat berarti bahwa adanya kebijakan Politik Luar Negeri dalam suatu Negara memandang bahwa dalam perkembangan Negara itu membutuhkan campur tangan dari Negara lain. Kondisi politik di suatu Negara dapat terpengaruh dengan kondisi politik Negara lain. Hal ini karena Negara satu dengan Negara lain akan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Misalnya dalam bidang perekonomian, terdapat ekspor dan impor, dalam bidang politik ada berbagai perjanjian dan kerjasama antara Negara satu dengan Negara lain, dan sebagainya. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Childs (2019: 2) yang mengungkapkan bahwa :

Politik Luar Negeri adalah pokok-pokok yang menjadi dasar hubungan luar negeri suatu Negara. Hubungan tersebut dapat bersifat regional dengan Negara tetangga atau dengan Negara yang berada dalam satu wilayah, dan hubungan Internasional ; Negara-Negara seluruh dunia dan organisasi-organisasi yang ada.

Terkait dengan teori di atas dapat dijelaskan bahwa Politik Luar Negeri mengacu pada hubungan antara Negara satu dengan Negara lainnya. Dalam hubungannya dengan Negara lain, terdapat suatu istilah hubungan regional, dan hubungan internasional. Hubungan Negara yang bersifat regional adalah suatu hubungan antara Negara satu dengan Negara yang lain yang masih dalam satu wilayah misalnya Indonesia dengan Malaysia ataupun dengan Thailand yang sama-sama masih dalam satu wilayah yaitu Asia Tenggara. Sedangkan

hubungan Negara yang bersifat internasional adalah hubungan antara Negara satu dengan Negara lain yang ada di dunia baik dalam satu wilayah maupun berbeda wilayah, misalnya hubungan antara Indonesia dengan Negara lain di dunia melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Kusmayadi (2020) menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri dijalankan oleh Soekarno dilakukan demi kepentingan nasional. Pada era pemerintahannya, kepentingan nasional utama bagi bangsa Indonesia adalah pengakuan akan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa (nation building). Kepentingan nasional tersebut diterjemahkan dalam suatu kebijakan luar negeri, tujuannya mencari dukungan juga pengakuan terhadap kedaulatan bangsa, serta untuk menunjukkan karakter bangsa Indonesia kepada Negara-Negara lain. Politik dapat dipahami sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam Negara. Lebih sederhananya, politik dapat dipahami sebagai proses interaksi antara pihak penguasa dan pihak yang dikuasai (Usman & Setiadi, 2013).

b. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan merupakan suatu kebijakan dalam mengatur dan mengelola serta menata suatu Negara. Pemerintahan dilakukan dengan tujuan untuk menjalankan tugas-tugas Negara yang dilakukan oleh para petinggi Negara baik itu DPR, Prseiden, maupun MPR. Ramlan Subakti (1992:167) mengatakan :

Pemerintahan secara etimologis berasal dari bahasa Yunani; *kubernan* atau nahkoda kapal, artinya menatap kedepan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat-Negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat-Negara pada masa yang akan datang dan mempersiapkan langkah-langkah untuk menyongsong perkembangan masyarakat serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ketujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu kegiatan pemerintah lebih menyangkut pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan masyarakat-Negara.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diambil pengertian bahwa pemerintahan adalah kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat-Negara dan mempersiapkan langkah-langkah untuk perkembangan

masyarakat serta mengarahkan masyarakat ketujuan yang telah ditetapkan. Soewargono (2010:20) mengartikan pemerintahan “sebagai pemegang kekuasaan politik, sering disebut pula penguasa sebagai penyelenggara pemerintahan umum”. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diambil pengertian bahwa pemerintahan adalah pemegang kekuasaan politik suatu Negara. David Apter (1977:10)mengatakan :

Pemerintahan adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya itu adalah bagian dari monopoli praktis mengenai kekuasaan.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diambil pengertian bahwa pemerintahan adalah suatu anggota yang memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan sistem monopoli praktis mengenai kekuasaan. Dalam hal ini berarti pemerintahan adalah hakpenguasa untuk menjalankan pembangunan suatu Negara, mengatur sistem perekonomian Negara, mengatur sistem hukum Negara, dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga berarti suatu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemimpin Negara yang dipilih oleh rakyat untuk menjalankan roda pembangunan di suatu Negara.

Menurut Hakiki (2019) bahwa Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa Demokrasi Parlemerter, atau yang dikenal juga dengan sebutan Demokrasi Liberal adalah sistem kabinet parlemerter. Sistem pemerintahan tersebut berlandaskan pada UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950). Sistem pemerintahan ini menetapkan bahwa kabinet-kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem kabinet parlemerter juga menerapkan sistem pemungutan suara (voting) yang digunakan dalam pemilihan umum (Pemilu), mosi, dan demonstrasi sebagai bentuk rakyat dalam mengekspresikan hak untuk ikut serta dalam berpolitik.

Menurut Astawa (2017) bahwa Sistem pemerintahan didefinisikan sebagai hubungan kekeuasaan, wewenang dan fungsi antara dua atau lebih organ Negara maupun pemerintahan secara timbal balik. Khususnya hubungan antara legislatif atau badan pembuat undang-undang dan eksekutif atau pelaksana undang-undang.

Definisi lain terkait pemerintahan dikemukakan oleh Mahfud (2016) yang menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Negara adalah mekanisme kerja dan koordinasi atau hubungan antara ketiga cabang kekuasaan seperti legislatif eksekutif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan berupa tatanan hubungan antara komponen pemerintahan.

2. Batasan Istilah

a. Istilah Politik Luar Negeri

Politik Luar Negeri merupakan reaksi terhadap perubahan lingkungan Internasional dalam bentuk strategi dan rencana yang dirumuskan oleh para pembuat kebijakan suatu Negara.

b. Istilah Pemerintahan

Pemerintahan adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan politik, sering disebut pula penguasa sebagai penyelenggara pemerintahan umum untuk menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat-Negara.

D. Tujuan Kajian

Tujuan kajian merupakan suatu hal yang menjadi titik pencapaian seorang penelitian, tujuan kajian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas, kemudian penulis menguraikan untuk mengetahui arah penelitian tersebut. Adapun tujuan kajian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses lahirnya Politik Luar Negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan dampak dari pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno bagi Indonesia.

E. Kegunaan Kajian

Adapun kegunaan kajian dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan dan khazanah keilmuan dalam memahami kajian historis tentang Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan Presiden Soekarno (1947-1966).

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah khazanah keilmuan, menambah wawasan pengetahuan yang lebih luas lagi bagi peneliti, khususnya dapat memperkaya ilmu mengenai sejarah Politik Luar Negeri Indonesia masa pemerintahan Soekarno, serta sebagai syarat wajib untuk menyelesaikan pendidikan S1, Program Studi Pendidikan Sejarah di Universitas Muhammadiyah Metro.

b. Bagi Akademisi

Dalam kajian penelitian ini khususnya bagi pembaca diharapkan mampu memperkaya wawasan ilmu pengetahuan, memberi pemahaman dan tambahan informasi mengenai pembelajaran sejarah dibidang Politik Luar Negeri Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno. Dan penelitian ini diharapkan bisa mewarnai dinamika keintegrasian dibidang kesejarahan baik dikalangan akademisi maupun non-akademisi serta diharapkan hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai dasar sumber informasi bagi peneliti selanjutnya.

F. Metode Kajian

Penelitian dapat menggunakan jenis-jenis metode yang dipilih berdasarkan prosedur penelitian yang cocok dalam melakukan penelitiannya. Pada penelitian ini menggunakan penelitian sejarah atau historis karena objek yang diteliti adalah peristiwa masa lampau dan sejarah mengenai Kajian Historis Tentang Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan Presiden Soekarno (1947-1966), sehingga metode yang sesuai untuk digunakan adalah metode penelitian sejarah atau historis. Metode penelitian sejarah itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu cara, prosedur atau teknik yang sistematis sesuai dengan asas-asas dan ketentuan aturan ilmu sejarah untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Gilbert J. Garragen dari Daliman (2012:27) menjelaskan bahwa :

Metode sejarah sebagai seperangkat asas dan aturan yang sistematis yang didesain guna membantu secara efektif untuk mengumpulkan

sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan sintesis hasil-hasil yang dicapainya yang pada umumnya dan ditampilkan dalam bentuk tertulis untuk mencapai kebenaran sejarah.

Dari pengertian di atas dapat diambil pengertian bahwa metode sejarah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengkaji suatu masalah menggunakan prosedur yang sistematis berdasarkan langkah-langkah metode penelitian untuk membantu peneliti menganalisis dan menguji secara kritis data-data yang diperoleh dari berbagai sumber serta menguji data-data tersebut agar bersifat fakta dan dapat dipercaya kebenarannya. Dalam penelitian ini menggunakan metode historis dengan melakukan studi kepustakaan. Peneliti menganalisa data-data dari sumber-sumber mengenai materi yang akan dikaji. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian historis sebagai berikut :

1. Pemilihan Topik

Pemilihan topik harus topik sejarah dan dapat diteliti sejarahnya. Topik yang dapat dikerjakan dalam waktu yang tersedia, tidak terlalu luas sehingga melampaui waktu. Menurut Kuntowijoyo(2013:70) dalam memilih suatu topik untuk penelitian, sebaiknya dipilih berdasarkan :

a. Kedekatan emosional

Kedekatan emosional merupakan hal yang penting dalam pemilihan topik, seorang peneliti harus memiliki kedekatan dengan yang akan diteliti untuk mempermudah jalannya sebuah penelitian.

b. Kedekatan intelektual

Kedekatan intelektual merupakan apabila seorang peneliti telah membaca-baca topik yang mempunyai kedekatan emosional dengan dirinya, maka seharusnya peneliti telah menguasai topik yang telah dipilih, walaupun belum menguasainya maka peneliti perlu membaca literatur yang berkaitan dengan topik yang telah dipilih. Karena dengan begitu peneliti dapat menyelesaikan topik yang telah dipilih dengan baik.

2. Pengumpulan Data (Heuristik)

Dalam melakukan penelitian sejarah, memerlukan pengumpulan data-data atau sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan penelitian agar memperoleh data dan sumber yang benar-benar akurat dan relevan. Menurut Sugiyono (2019: 29) bahwa "pengumpulan data ini dilakukan

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.” Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca literatur sumber sejarah atau dokumen-dokumen yang terdapat dipergustakaan.

Heuristik merupakan tahap pertama dalam melakukan suatu penelitian sejarah adalah mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Helius Sjamsudin (2007 : 86) “Heuristik adalah sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah, atau evindensi sejarah”.

Dari kutipan di atas dapat diambil pengertian bawah heuristik adalah langkah awal dalam melakukan penelitian sejarah, dimulai dari mencari sumber-sumber data sejarah yang dipercaya kebenaran dan keabsahannya untuk merekonstruksi masa lalu.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Adapun tahapan yang dilakukan adalah mengumpulkan berbagai literatur terkait dengan topik penelitian. Pengumpulan literatur yang dilakukan adalah mengumpulkan literatur, jurnal, dan arsip-arsip melalui internet maupun perpustakaan.

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menghimpun informasi data yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Semua informasi tersebut dapat diperoleh dengan banyak membaca buku, jurnal, karangan ilmiah, arsip, internet dan sumber-sumber tertulis lainnya baik cetak maupun elektronik.

Studi kepustakaan tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian, teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan dilakukan penelitian dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Dengan melakukan studi kepustakaan peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya oleh peneliti data-data yang diperoleh dicermati, dibaca, dianalisis, dan dikembangkan lagi berdasarkan yang akan digunakan sebagai bahan data dalam sebuah penelitian.

Menurut (Daliman, 2012: 54-55) Langkah-langkah dalam melakukan studi kepustakaan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan berbagai sumber data sebanyak-banyaknya seperti buku, jurnal, dokumen-dokumen baik tercetak maupun elektronik dengan memperhatikan unsur materi berkaitan dengan penelitian.
2. Membaca literatur yang relevan dengan judul penelitian mengenai kajian historis tentang Politik Luar Negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno (1947-1966).
3. Memperhatikan dari sumber-sumber baik dari pengarang, daftar isi, dan materi pembahasan.

Dalam melakukan penelitian studi kepustakaan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Metro, mencari sumber yang sesuai dengan kajian yang akan dibahas. Serta mencari sumber dari literatur, jurnal, kerangka ilmiah, artikel, dan arsip, dokumen yang mendukung dalam melakukan penelitian.

Mengumpulkan literatur atau jurnal yang relevan dengan judul yang diteliti dan banyak membaca buku yang dianggap relevan yang berkaitan dengan judul yang diteliti (Abdurahman, 2013:29). Langkah-langkah pengumpulan data (Heuristik) dalam penelitian ini dilakukan dengan:

- 1) Mengumpulkan literatur atau artikel yang mendukung dan relevan dengan judul yang diteliti yang dilakukan dengan cara:
 - a) Mendatangi Perpustakaan yang menjadi tempat penelitian. Dalam hal ini perpustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan milik Universitas Muhammadiyah Metro, dan Perpustakaan Daerah Kota Metro (Dispusarda).
 - b) Mencari literatur terkait dengan politik luar Negeri di Indonesia di rak perpustakaan atau menanyakan langsung pada petugas perpustakaan.
 - c) Melakukan pengumpulan data melalui situs internet untuk mencari jurnal-jurnal yang relevan. Adapun jurnal yang berhasil dikutip seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Literatur Berupa Jurnal

No	Jurnal	Peneliti
1	Politik Luar Negeri Indonesia Era Presiden Soekarno	Muhammad Hafizh Irhamna (2020)
2	Politik Luar Negeri Republik Indonesia Pada Masa Konfrontasi Indonesia Malaysia 1963-1966	Yadi Kusmayadi (2017)
3	Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin	Sandy Dwi Aryanto dan Corry Lana (2018)
4	Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia 1945-1966	Nita Ernawati (2017)
5	Politik Luar Negeri Indonesia Masa Transisi Pemerintahan Orde Lama Pemerintahan Orde Baru 1965-1973	Muhammad Zulfan Arifin

- 2) Dalam pengumpulan data juga meliputi kegiatan membaca buku.
- 3) Menggaris bawahi poin-poin penting dan relevan dengan kajian yang diteliti yaitu Politik Luar Negeri.
- 4) Mengutip sebagian dari kalimat atau paragraf terkait dengan Politik Luar Negeri yang ada di buku maupun di jurnal, kemudian mengubahnya kedalam kalimat tidak langsung.

Table 2. Keterangan Data Sumber Buku

No.	Jenis Sumber
1.	Politik Bebas Aktif: Tantangan dan Kesempatan
2.	Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia
3.	Quo Vadis Politik Luar Negeri Indonesia
4.	The Bandung Connection
5.	Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI
6.	Politik Luar Negeri Republik Indonesia

3. Keabsahan Alat Pengumpulan Data

Data harus dikumpulkan, digali, dicatat dan diusahakan untuk mencari kebenarannya. Oleh karena itu dilakukan proses pemilihan dan menentukan cara yang tepat untuk mengembangkan data. Langkah kedua dalam melakukan penelitian sejarah setelah heuristik adalah verifikasi. Kritik sumber umumnya dilakukan terhadap sumber-sumber pertama. Kritik ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber itu. Kritik ekstern adalah verifikasi tentang otentisitas dan keaslian sumber, sedangkan kritik intern adalah verifikasi terhadap kredibilitas isi sumber (Kuntowijoyo, 1995: 101).

a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern ialah cara untuk melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah, penelitian ini untuk menguji otentisitas, dan integritas. Adapun fungsi kritik ekstern memeriksa sumber sejarah dasar dua butir pertama dan menegakkan sedapat mungkin otentisitas dan integritas dari sumber sejarah itu (Sjamsuddin 2017: 104).

Dengan menggunakan kritik ekstern maka akan membantu peneliti dalam mencari sumber-sumber yang akan digunakan dalam proses penelitian, seperti yang telah dijelaskan A. Daliman (2012:69) sebagai berikut: sasaran kerja kritik eksternal adalah uji otentisitas (keaslian) suatu sumber atau dokumen.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan sebuah penelitian sejarah harus diperhartikan otentisitas dan integritas suatu sumber atau dokumen sejarah.

Adapun langkah-langkah kritik ekstern antara lain, Daliman (2012:71)

- 1) Menguji di dalam sumber apakah nama pengarang dan tanggal yang tercantum adalah benar dan asli.
- 2) Menguji keaslian sumber atau dokumen agar terhindar dari sumber hasil dan plagiarism.
- 3) Mengecek antara buku dan judul penelitian tersebut relevan.

Untuk mengetahui validitas sumber data dikemukakan dalam tabel kritik ekstern sebagai berikut:

Tabel 3. Uji kesejatian sumber data “Kajian Historis Tentang Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan Presiden Soekarno (1947-1966)”.

No.	Tema yang di bahas	Sumber data/Pengarang	Keterangan
1.	Politik Bebas Aktif Dan Perang Dingin	M. Sabir	Asli
2.	Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pemerintahan Presiden Soekarno	Yumetri Abidin	Asli
3.	Quo Vadis Kebijakan Luar Negeri Indonesia	Yanyan Mochamad Yani, Ian Montratama	Asli
4.	Situasi Internasional yang Meliputi Konperensi Bogor	Roeslan Abdulgani	Asli
5.	Politik Bebas Aktif dan Konferensi Asia – Afrika	Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto	Asli

b. Kritik Intern

Dalam penelitian sejarah selain melakukan pengujian kritik ekstern kita juga perlu melakukan pengujian kritik intern, kritik intern merupakan menganalisis uji kebenaran mengenai informasi suatu dokumen untuk mengetahui fakta mengenai sejarah. Menguji lebih jauh lagi isi dokumen untuk mengetahui kandungan dalam suatu dokumen benar dan dapat dipercaya kredibel dan reliable. Untuk menentukan kredibilitas atau reliabilitas sumber dipergunakan kritik intern.

Kritik intern dengan uji kredibilitasnya ingin mengungkapkan informasi dari informan mengenai dua kriteria.

Menurut Daliman (2012:75) bahwa:

Sasaran dari kritik intern adalah uji kredibilitas informan atau pengarang sumber atau dokumen. Uji kredibilitas berupaya

untuk menguji 1.Kemampuan untuk melapor atau menulis dokumen secara akurat, dan 2.Kemauan untuk melapor atau menulis dokumen dengan benar.

Berdasarkan kutipan di atas dijelaskan bahwa suatu kegiatan dalam penelitian sejarah untuk menelaah kebenaran dari sebuah sumber informan atau pengarang sumber.Kritik intern juga digunakan untuk menguji kredibilitas dokumen secara benar dan akurat. Untuk mengetahui kesesuaian sumber data, berikut ini di kemukakan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.Uji kesesuaian sumber data “Kajian Historis Tentang Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan Presiden Soekarno (1947-1966)”.

No.	Sumber Buku	Konsep yang dibahas	Halaman Buku Sumber	Keterangan
1.	Politik Bebas Aktif: Tantangan dan Kesempatan	Politik Bebas Aktif Dan Perang Dingin	171-190	Asli
2.	Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia	Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pemerintahan Presiden Soekarno	35-90	Asli
3.	Quo Vadis Politik Luar Negeri Indonesia	Quo Vadis Kebijakan Luar Negeri Indonesia	59-93	Asli
4.	The Bandung Connection	Situasi Internasional yang Meliputi	16-23	Asli

No.	Sumber Buku	Konsep yang dibahas	Halaman Buku Sumber	Keterangan
		Konperensi Bogor		
5.	Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI	Politik Bebas Aktif dan Konferensi Asia – Afrika	226-236	Asli

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul tahapan berikutnya yaitu menganalisa kebenaran data-data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Setelah selesai melakukan tahap kritik atau verifikasi sumber, langkah selanjutnya yang diambil yaitu interpretasi. Interpretasi berarti menafsirkan makna kepada fakta-fakta atau bukti sejarah, setelah proses interpretasi terhadap sebuah fakta sejarah yang sudah teruji validitas dan reabilitas selesai dilakukan barulah proses historiografi.

Menurut Daliman, (2012:83) menyatakan bahwa:

Interpretasi adalah upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam kerangka rekonstruksi realitas masa lampau. Interpretasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses penelitian sejarah dan penulisan sejarah, puncak kerja seluruh aktivitas penelitian sejarah berada pada tahap interpretasi.

Dari kutipan di atas dapat diambil pengertian bahwa interpretasi merupakan sebuah upaya untuk menafsirkan fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah yang telah berhasil dihimpun dan telah diseleksi uji kebenarannya dengan kritik eksternal maupun kritik internal yang mana interpretasi merupakan proses yang melibatkan berbagai kegiatan memberikan kembali relasi antar fakta-fakta sejarah.

Menurut Herlina (2011:15) "Interpretasi merupakan tahapan atau kegiatan menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh".

Langkah-langkah dalam melakukan interpretasi adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan sumber-sumber sejarah.
- b. Melakukan kritik
- c. Menafsirkan Fakta-fakta
- d. Menetapkan makna dan keterkaitan antar sumber yang diperoleh kemudian menafsirkan dalam kajian sejarah.

Berdasarkan kutipan di atas dapat diambil pengertian berarti interpretasi adalah sebuah penjelasan, makna, arti, pendapat atau pandangan teori yang diperoleh dari pemikiran yang mendalam. Metode analisis data setelah melakukan kritikan dan interpretasi sumber adalah historiografi.

Historiografi adalah tahap terakhir dari beberapa fase yang biasanya harus dilakukan oleh peneliti, dimana historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan dan laporan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Teknik penulisan ini bepedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh kampus Universitas Muhammadiyah Metro. Menurut Daliman (2012:99) sebagai berikut: “penulisan sejarah (historiografi) menjadi sarana mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang diungkap, diuji (verifikasi) dan diinterpretasi”.

Dalam penelitian ini langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan kegiatan historiografi atau penulisan sejarah adalah :

- 1) Mengutip kalimat terkait dengan Politik Luar Negeri di Indonesia kemudian dituangkan dalam bentuk kalimat tidak langsung
- 2) Menuliskan komentar ataupun penjelasan lebih lanjut terkait dengan kutipan yang diambil
- 3) Melakukan penulisan sejarah secara deskriptif naratif yaitu penulisan sejarah secara jelas, rinci, dan sistematis.
- 4) Melakukan verifikasi antara kutipan satu dengan kutipan yang lain
- 5) Membuat kesimpulan

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan peristiwa yang dibahas dalam penelitian ini akan dapat digambarkan sehingga mudah untuk dipahami dan merupakan suatu sumbangan bagi ilmu pengetahuan.

G. Kerangka Berfikir

Pada penulisan sejarah ini peneliti menggunakan kerangka pikir yang tujuannya adalah sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat, agar mendapatkan hasil yang akurat dan efektif.

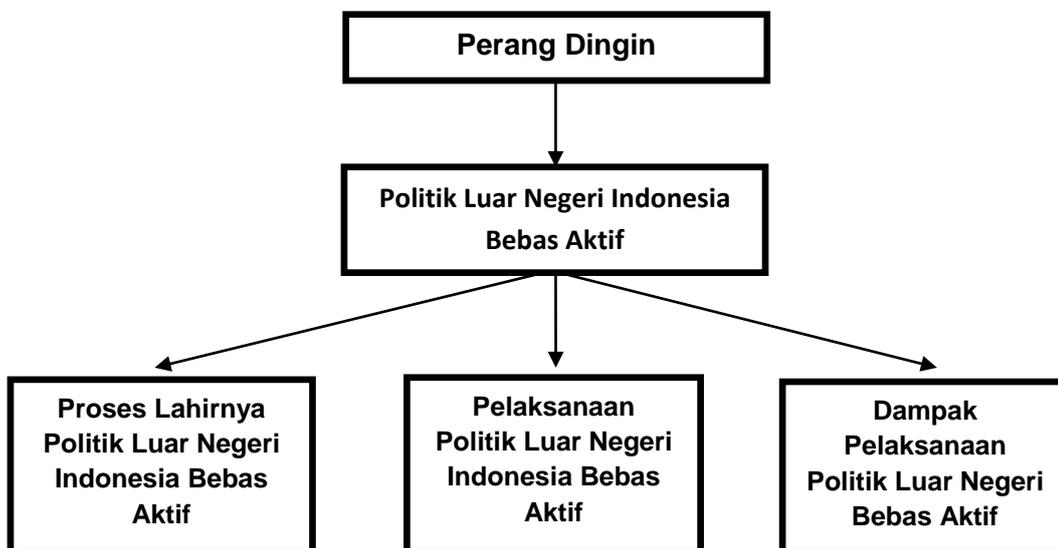
Perang Dingin adalah suatu bentuk perang yang tidak menggunakan kekuatan angkatan bersenjata secara langsung. Tetapi menggunakan cara-cara, alat-alat dan kekuatan-kekuatan Ideologi, politik, ekonomi dan militer guna mencapai tujuan nasional. Meskipun pada dasarnya Perang Dingin tidak menggunakan kekuatan angkatan bersenjata secara langsung namun peranan militer sangat penting dalam Perang Dingin. Karena angkatan bersenjata yang kuat dapat digunakan untuk mengancam ataupun menekan lawan secara langsung maupun tidak langsung.

Perang Dingin muncul setelah Perang Dunia II, dalam hubungan Internasional terjadi perebutan kekuasaan secara besar-besaran melalui konflik Ideologi dan politik antara Kedua Blok yang berlawanan yaitu Blok Barat dengan menganut Ideologi Kapital-Liberal yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur dengan menganut Ideologi Komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet, hal ini sangat berdampak pada politik Indonesia. Soekarno dan Hatta hadir sebagai Dwi Tunggal perjuangan bangsa Indonesia yang memberikan pengaruh sangat besar pada perkembangan Indonesia untuk menentukan kebijakan terkait dengan Politik Luar Negeri Indonesia sehingga revolusi berjalan mengarah yang lebih baik.

Prinsip dasar pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia telah dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama, Indonesia percaya "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan." Indonesia juga percaya, pembentukan Negara ini adalah untuk "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Dua prinsip tersebut kemudian menjadi semangat penggerak Politik Luar Negeri Indonesia yang tercetus dalam Politik Bebas Aktif.

Bebas berarti bahwa bangsa Indonesia berhak menentukan sikap menghadapi masalah-masalah yang ada tanpa berpihak pada Blok-Blok kekuatan atau persekutuan militer yang ada di dunia. Aktif berarti bahwa Indonesia selalu memperjuangkan "kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial” didunia.Prinsip Bebas Aktif merupakan sumber dari Politik Luar Negeri yang dijalankan Indonesia.Para pemimpin Indonesia menerapkan prinsip ini sesuai dengan situasi sistem Internasional yang ada.



Gambar 1. Bagan kerangka berfikir

H. Kajian Relevan

Kajian relevan merupakan kajian tentang sebuah penelitian yang telah dilakukan seputar masalah yang sedang diteliti, maka disini penelitian yang akan dilakukan merupakan perkembangan dari penelitian sebelumnya sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang penulis lakukan bukan merupakan duplikasi. Dalam penulisan sejarah ini peneliti juga harus menyesuaikan pula antara konsep pembahasan yang akan dikaji dengan literatur yang didapat dari penulisan sejarah terdahulu baik dalam sebuah bentuk referensi buku cetak maupun artikel jurnal. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan terpercaya dalam sebuah hasil penulisan sejarah. Adapun kajian penelitian yang relevan dengan kajian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Mega Kusumaningtias (2013) skripsi yang berjudul “Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Awal Orde Baru 1966-1981” Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Hasil dari penelitiannya yaitu Politik

Luar Negeri Indonesia pada masa awal Orde Baru mengalami perbedaan gaya yaitu lebih condong terhadap Barat, mengedepankan ekonomi, menjalin kerjasama kawasan Asia Tenggara dan adanya peranan penting dari pihak militer. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal menjelang munculnya Orde Baru. Kemudian dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan dan memperoleh juga keberhasilan. Persamaan penelitian relevan ini dengan penelitian yang sedang saya kaji adalah sama-sama membahas tentang Politik Luar Negeri Indonesia, sedangkan perbedaannya terletak pada tahun pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia.

2. Fiky Arista (2016) skripsi yang berjudul "Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia (Kajian Historis Perbandingan Kebijakan Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja dan Ali Alatas Sebagai Menteri Luar Negeri Tahun 1966-1998)" Fakultas Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Hasil dari penelitiannya yaitu Adam Malik yang mengalami masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru focus kebijakannya pada penyelesaian masalah-masalah yang terjadi selama Orde Lama, seperti masalah Konfrontasi Indonesia-Malaysia, masuknya Indonesia kembali menjadi anggota PBB serta menjadi salah satu tokoh yang membentuk ASEAN. Pada tahun 1978, Mochtar Kusumaatmadja menggantikan Adam Malik. Fokus Mochtar Kusumaatmadja dalam kebijakan Politik Luar Negeri pada masalah hukum laut yang dirintis sejak Deklarasi Djuanda serta membantu menyelesaikan masalah manusia perahu Vietnam. Pada 1988 Ali Alatas menggantikan Mochtar Kusumaatmadja, pada masa pemerintahannya Indonesia berhasil memperbaiki hukum bilateral dengan Australia dan memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Persamaan penelitian relevan ini dengan penelitian yang sedang saya kaji adalah sama-sama membahas Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia, sedangkan perbedaannya terletak pada tokoh yang diangkat dalam penelitian dan tahun pelaksanaan yang diangkat dalam penelitian.
3. Nur Amaliyah (2015) skripsi yang berjudul "Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Dibawah Pemerintahan Presiden Jokowi" Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Hasanuddin. Hasil dari penelitiannya yaitu menjelaskan substansi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah

Pemerintahan Presiden Jokowi. Di mana, pada pemerintahan Presiden Jokowi saat ini menekankan kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif dengan melihat kondisi kekinian bangsa Indonesia yang berlandaskan pada TriSakti. Penjabaran TriSakti yakni: Berdaulat dalam bidang politik, Berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Persamaan penelitian relevan ini dengan penelitian yang sedang saya kaji adalah sama-sama membahas Politik Luar Negeri Indonesia, sedangkan perbedaannya terletak pada tokoh dan tahun pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia.

Setelah merangkum kutipan relevan yang ada terkait dengan Politik Luar Negeri di Indonesia masa pemerintahan presiden Soekarno maka dalam penelitian ini akan dihasilkan suatu penelitian terbaru (novelty) terkait dengan Politik Luar Negeri. dalam penelitian ini kebaruan yang dibahas adalah Politik Luar Negeri yang hanya terfokus pada kebijakan yang dilakukan oleh presiden pertama di Indonesia. Dalam pembahasannya hal yang menarik adalah presiden Soekarno sebagai presiden pertama di Indonesia tentunya mendapat tantangan yang besar untuk menjalin hubungan dengan luar negeri. sebagaimana pada masa kepemimpinan Soekarno, Negara Indonesia baru saja merdeka, sehingga masih ada pengaruh-pengaruh bangsa penjajah yang ingin merebut kembali daerah jajahannya. Selain itu, bangsa Indonesia yang baru merdeka tentunya stabilitas dan kondisi Politik Luar Negeri belum terjalin dengan baik sehingga presiden Soekarno harus memikirkan berbagai cara untuk menjalin hubungan dengan luar negeri.

I. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan agar penelitian ini tidak menyimpang dari kerangka yang telah ditetapkan dan tidak terjadi kesalahpahaman atau kesimpangsiuran, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Sifat Penelitian	: Historis
Obyek Penelitian	: Kajian Historis Tentang Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan Presiden Soekarno (1947-1966)
Subjek Penelitian	: Literatur, E-Book dan sumber lain yang relevan dan mendukung penelitian ini.
Tempat Penelitian	: Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Metro Lampung
Waktu Penelitian	: Tahun 2022
